

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Mengacu pada gagasan yang disampaikan Anggara (2018:33-34), konsep kebijakan publik menggambarkan serangkaian tindakan strategis yang diambil pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi utamanya dalam mengatur dan mengambil keputusan terkait kepentingan publik. Kebijakan publik bukan sekadar serangkaian peraturan atau keputusan administratif, melainkan hasil dari proses politik yang kompleks dalam konteks sistem pemerintahan suatu negara. Proses ini melibatkan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk wakil rakyat, birokrasi, dan masyarakat sipil, yang bersama-sama berkontribusi dalam pembuatan dan implementasi kebijakan. Peran birokrasi sangatlah krusial dalam konteks ini, karena mereka bertanggung jawab tidak hanya dalam menyusun rancangan kebijakan, tetapi juga dalam menjalankan dan memastikan efektivitasnya dalam praktek sehari-hari. Birokrasi sebagai penyelenggara utama negara memiliki peran ganda sebagai pelaksana dan pengawas implementasi kebijakan, yang tidak terlepas dari tuntutan untuk menjaga akuntabilitas dan responsif terhadap dinamika sosial dan politik yang terus berubah.

Kebijakan publik adalah manifestasi keputusan yang memegang kendali atas nasib banyak orang dalam sebuah tataran strategis yang mencakup visi dan misi negara. Keputusan ini tidak sembarangan dibuat, melainkan merupakan hasil pemilihan otoritas politik yang memperoleh mandat langsung dari suara rakyat, sebuah proses yang melibatkan aspirasi dan harapan kolektif. Pelaksanaan kebijakan tersebut kemudian diserahkan kepada birokrasi, sebagai pengemban

amanah untuk menjalankan administrasi negara dengan kecermatan dan ketelitian. Dalam konteks modern, fokus utama kebijakan publik terletak pada pelayanan kepada masyarakat, segala upaya yang dilakukan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas hidup bersama. Tantangan besar bagi negara adalah menjaga keseimbangan antara kewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi sebagai sumber pendanaan yang diperlukan. Sementara itu, dalam proses mengarahkan kebijakan ini, penting untuk mengharmonisasikan berbagai kepentingan dan aspirasi yang berbeda dalam masyarakat, sejalan dengan semangat konstitusi yang mengikat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.

Secara empiris, kompleksitas yang melingkupi kebijakan publik harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Tidak hanya terbatas pada proses perumusan kebijakan atau substansi yang terkandung dalam kebijakan tersebut, namun juga mencakup dampak dan implikasi yang dihasilkan. Kebijakan publik tidak sekadar mengatur tata aturan atau norma yang harus dipatuhi, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk meramalkan serta mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin timbul dari implementasinya. Responsifitas kebijakan publik menjadi krusial dalam konteks ini, di mana kebijakan harus mampu menanggapi perubahan dan dinamika dalam masyarakat serta lingkungannya. Selain itu, kebijakan publik juga harus dapat mengakomodasi dan mengintegrasikan beragam kepentingan yang berbeda dalam proses perumusannya. Produk akhir dari kebijakan publik haruslah menjadi refleksi dari prioritas yang mendesak dan esensial, dengan tujuan untuk mengatur dan mengelola kepentingan yang lebih luas secara efektif dan efisien.

Kajian kebijakan publik merupakan upaya komprehensif untuk menyelidiki teori dan prosedur yang melekat dalam dinamika terbentuknya kebijakan publik. Selain merupakan hasil akhir suatu keputusan, kebijakan publik juga merupakan cerminan dari perjalanan panjang yang mencakup sejumlah tahapan rumit dalam siklus penciptaannya. Tujuan utama kajian kebijakan publik adalah mengkaji secara menyeluruh setiap tahapan proses pembuatan kebijakan dengan harapan kebijakan yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara efektif dan berhasil. Siklus pembuatan kebijakan publik mencakup berbagai fase, seperti identifikasi masalah, perumusan agenda, pembuatan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Setiap tahapan ini melibatkan langkah-langkah dan metodologi yang mendalam, yang mempengaruhi bagaimana kebijakan dipahami, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat dan pihak terkait. Studi ini juga mengamati manfaat serta konsekuensi dari setiap tahapan dalam proses kebijakan publik, yang menjadi pertimbangan kritis bagi para aktor terlibat, baik itu pembuat kebijakan, birokrat, atau masyarakat umum yang terkena dampaknya. Dengan memahami dan menganalisis secara menyeluruh siklus pembuatan kebijakan publik, dapat tercapai kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan efisien dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam masyarakat dan negara.

2.2 Analisis Kebijakan

Dalam konteks analisis kebijakan publik, para ahli telah mengajukan sejumlah definisi. Ericson, dalam artikelnya "*The Policy Analysis Role of the Contemporary University*," menggambarkan analisis kebijakan publik sebagai "*future-oriented inquiry into the optimum means of achieving a given set of social*

objectives" (penyelidikan yang berorientasi ke depan terhadap cara optimal untuk mencapai serangkaian tujuan sosial).

Dror mengungkapkan, "*an approach and methodology for design and identification of preferable alternatives in respect to complex policy issues*" (pendekatan dan metodologi untuk merancang dan mengidentifikasi alternatif yang diinginkan terkait dengan isu-isu kebijakan yang kompleks).

Kent, sebaliknya, mendefinisikan analisis kebijakan sebagai "*that kind of systematic, disciplined, analytical, scholarly, creative study whose primary motivation is to produce well-supported recommendations for action dealing with concrete political problems*" (jenis studi sistematis, berdisiplin, analitis, ilmiah, kreatif yang tujuannya utama adalah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang didukung dengan baik untuk tindakan dalam menangani masalah-masalah politik konkret). Definisi-definisi ini mencerminkan beragam pendekatan yang digunakan oleh para pakar kebijakan, baik secara individu maupun kolektif, dalam kegiatan yang dikenal sebagai analisis kebijakan (*policy analysis*) (Wahab, 2015:40).

2.3 Proses Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan lebih dari sekedar proses untuk menemukan solusi terhadap permasalahan di masyarakat; hal ini juga merupakan sebuah seni tersendiri, dengan serangkaian langkah penting yang dipandu oleh berbagai pendekatan dari para pakar kebijakan publik terkemuka. Bardach menyajikan pandangannya dalam delapan tahap analisis yang, dengan ketelitian dan kehati-hatian yang luar biasa, mulai dari perumusan masalah yang cermat hingga pengumpulan bukti secara sistematis dan pemilihan opsi kebijakan yang paling mungkin untuk diterapkan.. Sebaliknya, pendekatan Patton & Sawicki menekankan

enam langkah esensial yang dimulai dari verifikasi masalah yang mendalam, penentuan kriteria evaluasi yang ketat, hingga evaluasi mendalam terhadap alternatif kebijakan untuk memilih solusi terbaik. Kraft & Furlong, di sisi lain, menyederhanakan dengan lima tahapan yang meliputi analisis mendalam terhadap akar permasalahan, pengembangan alternatif kebijakan yang inovatif, hingga penarikan kesimpulan yang komprehensif dan mendalam. Setiap pendekatan ini mencerminkan kompleksitas dan keunikan dalam memahami serta menanggapi tantangan dalam analisis kebijakan. Setiap langkah memainkan peran penting dalam merencanakan strategi yang penting dan juga berdampak besar pada masyarakat. Karena itu, analisis kebijakan bukan hanya sekadar proses rutin, tetapi sebuah perjalanan intelektual yang menggabungkan logika, kreativitas, dan ketelitian untuk menciptakan solusi yang berdaya guna dan berdampak luas bagi kehidupan sosial dan politik (Hamdi,2015:115-125).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur analisis kebijakan pada dasarnya melibatkan tiga tahapan utama yang krusial. Tahapan pertama adalah perumusan masalah kebijakan, di mana masalah yang dihadapi dalam masyarakat dipahami dengan mendalam dan terinci untuk menentukan akar permasalahan yang harus diatasi. Tahapan kedua adalah perumusan alternatif kebijakan, di mana berbagai opsi solusi atau kebijakan yang mungkin dilaksanakan dikembangkan secara sistematis untuk merespons masalah yang telah diidentifikasi. Tahapan terakhir adalah pemilihan alternatif kebijakan, di mana dari berbagai alternatif yang tersedia, dipilih satu yang dianggap paling efektif dan sesuai untuk diimplementasikan. Hasil dari ketiga tahapan utama ini selanjutnya didokumentasikan dalam bentuk makalah kebijakan (*policy paper* atau

policy brief), yang berfungsi sebagai dokumen formal yang memuat analisis, rekomendasi, dan justifikasi atas kebijakan yang direkomendasikan. Dokumen ini tidak hanya menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan, tetapi juga menjadi sarana untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dan masyarakat umum tentang urgensi dan kepentingan dari kebijakan yang diusulkan.

2.3.1 Perumusan Masalah Kebijakan

(Hamdi 2015:115) Menyusun perumusan masalah kebijakan adalah proses esensial untuk menetapkan suatu kondisi sebagai ketidaknyamanan yang memerlukan solusi. Dalam siklus kebijakan, tahap ini adalah inti dari penetapan agenda. Pentingnya kecermatan dan ketepatan dalam perumusan masalah kebijakan menekankan perlunya menghindari kesalahan, yaitu menyelesaikan masalah dengan benar dari awal. Dengan demikian, dalam konteks kebijakan publik yang bertujuan memberikan kebahagiaan maksimal bagi sebanyak mungkin orang, keseriusan diperlukan dalam menentukan dari awal siapa atau kelompok yang akan mendapatkan manfaat terbesar dari kebijakan tersebut.

2.3.2 Perumusan Alternatif Kebijakan

Patton dan Sawicki mengembangkan suatu kerangka kerja yang sistematis untuk menghasilkan alternatif kebijakan dengan cara memodifikasi solusi yang sudah ada. Mereka menawarkan dua belas pendekatan yang dapat diterapkan untuk menciptakan alternatif kebijakan yang berbeda. Pertama, dengan memperbesar (*magnify*) solusi yang ada, pengambil kebijakan dapat meningkatkan skala atau dampak dari suatu kebijakan yang sudah ada. Kedua, dengan memperkecil (*minify*), mereka dapat menyederhanakan atau membatasi cakupan dari solusi yang sama untuk menyesuaikan dengan kebutuhan atau situasi baru. Alternatif ketiga adalah

penggantian (*substitute*), di mana pengambil kebijakan mempertimbangkan mengganti elemen atau komponen dalam kebijakan dengan yang baru yang mungkin lebih sesuai atau efektif. Kemudian, dengan mengombinasikan (*combine*) elemen-elemen yang berbeda dari solusi yang ada, mereka dapat menciptakan pendekatan yang lebih holistik atau komprehensif dalam menghadapi masalah yang kompleks. Selanjutnya, penyusunan kembali (*rearrange*) memungkinkan untuk mengatur ulang urutan atau susunan dari komponen-komponen kebijakan yang sudah ada guna mencapai hasil yang berbeda atau lebih efisien. Aspek lokasi (*location*) dan waktu (*timing*) dari implementasi kebijakan juga dapat dimodifikasi untuk mengoptimalkan dampaknya terhadap masyarakat. Pendanaan (*financing*) yang tepat dapat menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sementara organisasi (*organization*) kebijakan juga perlu disesuaikan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan. Selain itu, memilih lokasi keputusan (*decision sites*) yang strategis dan memanfaatkan titik pengaruh (*influence points*) yang relevan dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi. Terakhir, manajemen risiko (*risk management*) adalah langkah krusial untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi risiko yang mungkin timbul dari kebijakan yang diambil. Dengan mempertimbangkan berbagai pendekatan ini, para pengambil kebijakan dapat menghasilkan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih inovatif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

2.3.3 Pemilihan Alternatif Kebijakan

Menurut Patton dan Sawicki, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam membandingkan alternatif kebijakan meliputi beberapa aspek kunci.

Pertama, kelayakan teknis (*technical feasibility*) menyoroti efektivitas (*effectiveness*) dari alternatif tersebut, yaitu sejauh mana alternatif dapat mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan, serta kecukupan (*adequacy*) sumber daya yang tersedia untuk mendukung implementasinya. Kemudian, kemungkinan ekonomi dan keuangan (*economic & financial possibility*) menitikberatkan pada efisiensi (*efficiency*), yakni sejauh mana alternatif dapat menghasilkan manfaat yang melebihi biaya yang dikeluarkan untuk implementasinya. Selanjutnya, kelayakan politik (*political viability*) mencakup aspek penerimaan (*acceptability*) oleh pihak-pihak terkait, sejauh mana alternatif ini diterima oleh masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, aspek legal (*legal aspect*) juga menjadi pertimbangan, yaitu sejauh mana alternatif kebijakan sesuai peraturan dan pedoman yang relevan. Pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor ini membantu para pengambil kebijakan dalam memilih alternatif kebijakan yang tidak hanya layak dan produktif, namun juga dapat diterima secara politis dan sesuai dengan hukum yang berlaku. (Hamdi 2015:120)

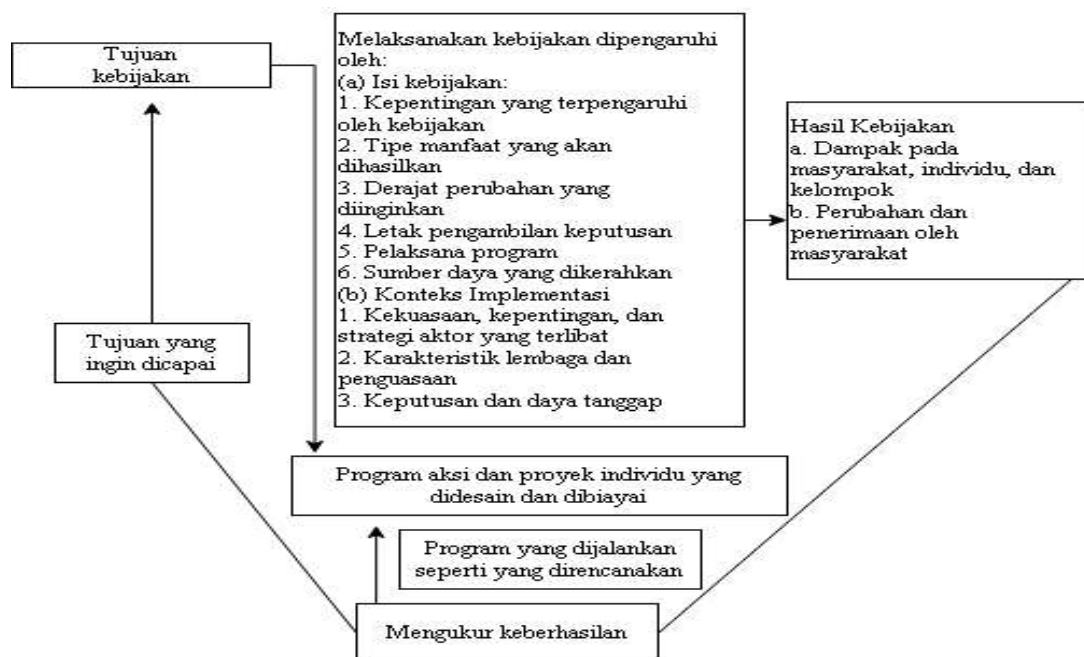
2.3.4 Penyusunan Makalah Kebijakan

Menurut Hamdi (2015:124), esensi dari sebuah makalah kebijakan adalah sebuah karya tulis yang dipersiapkan dengan tujuan yang sangat khusus: untuk memikat hati para pembuat kebijakan dengan urgensi yang dimiliki oleh sebuah masalah kebijakan tertentu. Di dalamnya, bukan hanya menguraikan masalah yang dihadapi, tetapi juga menawarkan beragam opsi untuk menanggulangi tantangan tersebut. Lebih jauh, makalah tersebut menghadirkan preferensi yang mendalam terhadap opsi yang dianggap paling sesuai untuk menyelesaikan masalah kebijakan yang telah diperinci sebelumnya.

Makalah kebijakan mencakup tiga elemen inti: administratif, esensial, dan pendukung. Bagian administratifnya meliputi surat pengantar dan ringkasan eksekutif. Surat pengantar tidak hanya mencantumkan semua pihak terlibat dan lampiran yang relevan, tetapi juga merinci siapa yang diharapkan bertindak, bagaimana, dan kapan. Sementara itu, ringkasan eksekutifnya menguraikan esensi dari seluruh dokumen dengan gaya penulisan yang tegas, singkat, dan mudah dimengerti oleh semua pihak terlibat, serta memberikan sekilas tentang rekomendasi yang diberikan.

2.4 Teori Pendekatan Merilee S. Grindle

Grindle, dalam karyanya "Politics and Policy Implementation in the Third World", menekankan bahwa sukses dalam implementasi kebijakan tergantung pada isi dan konteks kebijakan itu sendiri. Selain itu, tingkat keberhasilan implementasi juga bergantung pada tiga bagian variabel yang menentukan aset yang diharapkan untuk pelaksanaannya. (Anggara, 2018:254), yang tampak pada gambar berikut :



Gambar 1. 1 *Implementation as a Political and Administrative Process*

2.4.1 Isi Kebijakan

Menurut Anggara (2018:255), Kemajuan pelaksanaan suatu strategi sangat dipengaruhi oleh rumitnya substansi pendekatan yang sebenarnya. Strategi yang cenderung kontroversial atau kurang populer, terutama yang mengamanatkan perubahan besar dalam struktur sosial atau ekonomi, sering kali menemui resistensi yang kuat dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak sejalan dengan visi kebijakan tersebut. Fenomena ini sering terlihat pada kebijakan redistribusi yang berpotensi mengubah alokasi sumber daya secara signifikan, menghadirkan tantangan besar dalam implementasinya.

Hal yang sebaiknya digarispawahi bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga tergantung pada sejumlah faktor kunci. Pertama, kebijakan yang menawarkan manfaat kolektif atau luas cenderung lebih mudah diterima dan didukung oleh masyarakat atau kelompok sasarannya. Namun demikian, Semakin penting perubahan yang diinginkan melalui strategi, interaksi pelaksanaannya akan semakin membingungkan dan rumit. Contoh yang nyata adalah upaya-upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan anti-korupsi yang tidak hanya menuntut perubahan kebijakan tetapi juga transformasi perilaku sosial yang mendalam.

Kedua, faktor kedudukan dan distribusi kekuasaan pengambil keputusan sangat mempengaruhi dinamika implementasi. Semakin tersebar dan kompleks struktur pengambilan keputusan baik secara geografis maupun organisasional, semakin sulit pula koordinasi dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain itu, kemampuan dan dukungan dari para pelaksana kebijakan juga

menjadi faktor penentu keberhasilan. Keberhasilan implementasi sering kali bergantung pada tingkat keterampilan dan komitmen pelaksana program yang memahami secara mendalam tujuan serta strategi yang terlibat dalam kebijakan tersebut.

Terakhir, ketersediaan sumber daya yang memadai—seperti tenaga kerja terlatih, dana yang cukup, serta infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya—merupakan faktor krusial dalam memfasilitasi proses implementasi kebijakan. Sumber daya ini tidak hanya mempermudah pelaksanaan tetapi juga mengurangi risiko kegagalan atau keterlambatan dalam mencapai tujuan kebijakan.

Secara keseluruhan, pemahaman mendalam terhadap dinamika dan kompleksitas faktor-faktor ini menjadi kunci dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik secara efektif dan berkelanjutan.

2.4.2 Konteks Implementasi

Dalam konteks implementasi kebijakan, faktor-faktor seperti karakteristik implementor dan dinamika kekuasaan memainkan peran krusial dalam menentukan keberhasilannya, seperti yang dijelaskan oleh Anggara (2018:256). Implementasi sebuah kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh mudahnya kebijakan itu sendiri atau dukungan dari kelompok sasarannya, tetapi juga sangat bergantung pada individu atau lembaga yang bertanggung jawab melaksanakannya.

Pelaksana kebijakan memiliki karakteristik unik yang dapat memengaruhi cara mereka mengimplementasikan kebijakan tersebut. Mereka tidak bisa benar-benar terisolasi dari keyakinan, keinginan, dan, yang mengejutkan, kepentingan individu yang perlu mereka capai. Hal ini dapat mengarah pada potensi untuk memanipulasi atau membelokkan tujuan dari kebijakan sesuai dengan kepentingan

mereka sendiri, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas dan tujuan sebenarnya dari kebijakan tersebut.

Selain karakter individu pelaksana, faktor-faktor struktural juga berperan penting. Kekuasaan, kepentingan, dan prosedur penghibur terkait dengan eksekusi menjadi penentu utama dalam keberhasilan sebuah kebijakan. Misalnya, kekuatan politik yang merasa terlibat secara langsung dengan suatu program akan mengatur strategi untuk memastikan kepentingan mereka terwujud dalam hasil implementasi.

Dalam konteks institusional, karakteristik lembaga dan struktur kekuasaan juga memainkan peran penting dalam menentukan dinamika implementasi. Konflik yang muncul terkait dengan alokasi sumber daya atau dampak sosial dari kebijakan dapat memberikan petunjuk tidak langsung tentang ciri-ciri penguasa atau lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi tersebut. Secara keseluruhan, pemahaman mendalam terhadap dinamika lebih jauh lagi, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi adalah kunci dalam perencanaan prosedur yang layak untuk mencapai tujuan pengaturan yang ideal.

2.5 Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Menurut Satsipi (2019:123-124), pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi penting dalam konsep Good Governance yang berkelanjutan. Pertama, konsistensi menjadi landasan utama yang menunjukkan bahwa sebuah kebijakan yang berhasil harus diimplementasikan dengan konsisten mengikuti prosedur dan norma yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa setiap langkah dilakukan secara terencana, tetapi juga menciptakan prediktabilitas yang diperlukan dalam proses kebijakan.

Kedua, transparansi dianggap sebagai pilar penting dalam membangun

kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi mengharuskan informasi terkait pelaksanaan kebijakan publik tersedia secara terbuka, tersedia secara efektif, dan dapat dibenarkan bagi setiap individu yang terlibat erat. Dengan demikian, transparansi tidak hanya memfasilitasi akuntabilitas publik tetapi juga mempromosikan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses kebijakan.

Akuntabilitas, sebagai dimensi ketiga, menegaskan pentingnya bahwa setiap tindakan dalam pelaksanaan kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif. Ini mencakup tidak hanya kewajiban untuk mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku tetapi juga untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil dari kebijakan tersebut kepada publik.

Keadilan, dimensi keempat, menyoroti pentingnya pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini menghormati prinsip-prinsip keadilan sosial dan memastikan bahwa kebijakan tidak membedakan perlakuan berdasarkan karakteristik seperti identitas, ras, agama, golongan, atau kedudukan masyarakat tertentu.

Partisipatif, sebagai dimensi kelima, menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses kebijakan. Partisipasi ini tidak hanya sebagai sarana untuk mendukung implementasi kebijakan tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan.

Efektivitas, sebagai dimensi keenam, berkaitan langsung dengan pencapaian hasil atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Efektivitas mengukur sejauh mana pengaturan tersebut berhasil dalam mencapai target yang dinyatakan, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya yang

tersedia.

Terakhir, efisiensi menekankan pentingnya penggunaan sumber daya yang efisien dalam mencapai tujuan kebijakan. Ini mencakup pengelolaan yang hemat waktu, biaya, terlebih lagi, aset yang berbeda untuk mencapai hasil yang ideal, tanpa mengorbankan efektivitas dalam proses kebijakan. Secara keseluruhan, memperhatikan dan menerapkan dimensi-dimensi ini dalam pelaksanaan kebijakan adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan tetapi juga mampu memenuhi standar kebaikan tata pemerintahan yang baik.

2.6 Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Menurut Mazmanian dan Sabatier, yang diuraikan dalam karya Anggara (2018:257-261), faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menawarkan wawasan mendalam tentang dinamika kompleks pelaksanaan kebijakan publik.

2.6.1 Karakteristik dari Masalah (*Tractability of the Problems*)

Salah satu faktor utama adalah tingkat kesulitan teknis dari masalah yang ingin diselesaikan melalui kebijakan publik. Masalah yang mudah dipecahkan secara teknis, seperti kekurangan pasokan air minum, cenderung lebih mudah untuk diberdayakan solusinya dibandingkan dengan masalah yang lebih kompleks seperti kemiskinan struktural atau korupsi yang meluas. Pengenalan dan pemahaman yang mendalam terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

2.6.2 Karakteristik Kebijakan (Ability of Statute to Structure Implementation)

Pentingnya kebijakan yang terstruktur dengan baik dan jelas dalam mengatur pelaksanaan tidak dapat diabaikan. Kebijakan yang didefinisikan secara rinci, termasuk alokasi yang jelas terhadap sumber daya finansial dan manusia untuk mendukung implementasi, membantu mengurangi ambiguitas dan meningkatkan kesempatan keberhasilan. Pelaksanaan kebijakan yang tersusun baik memfasilitasi koordinasi yang efisien antara berbagai pihak terlibat dalam implementasi, mulai dari pemerintah hingga sektor swasta dan masyarakat sipil.

2.6.3 Lingkungan Kebijakan (Nonstatutory Variables Affecting Implementation)

Faktor lingkungan kebijakan mencakup dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang diimplementasikan serta keterampilan dan kapasitas dari para pelaksana atau implementor. Dukungan yang kuat dari masyarakat dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan penerimaan publik, yang pada gilirannya dapat memudahkan implementasi. Sementara itu, keterampilan dan komitmen dari para pelaksana kebijakan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan teknis dan administratif yang mungkin muncul selama proses implementasi. Secara keseluruhan, memahami dan mengintegrasikan ketiga faktor ini dalam perencanaan kebijakan dapat mengoptimalkan kemungkinan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Pendekatan yang komprehensif dan terstruktur membantu pemerintah dan stakeholders terlibat untuk mengatasi kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan solusi atas masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks dan bervariasi.

2.7 Retribusi Parkir

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber keuangan yang sangat penting bagi Pemda, sehingga telah berkembang menjadi salah satu komponen PAD yang signifikan. Kontribusi yang diberikan oleh retribusi daerah dapat diperoleh secara berkesinambungan dari masyarakat dan pengguna jasa yang menggunakan fasilitas atau layanan yang disediakan atau dikelola oleh Pemda setempat. Secara praktis, retribusi daerah sering kali dikenakan atas penggunaan infrastruktur umum seperti jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan administratif lainnya yang diselenggarakan oleh Pemda. Pendapatan yang diperoleh dari retribusi ini tidak hanya membantu Pemda dalam membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, tetapi juga memastikan berlanjutnya penyediaan layanan publik yang berkualitas bagi penduduk setempat. (Putra Pratama Saputra, 2020:42). Berikut dijabarkan sejumlah karakteristik khas Retribusi Daerah, yakni (Sebayang, 2022):

2.8 Pelaksanaan Bersifat Ekonomis

Artinya, retribusi daerah dikenakan untuk menutupi biaya pengeluaran atau penyediaan layanan atau fasilitas tertentu yang diatur atau dikelola oleh Pemda. Pendekatan ini memastikan bahwa biaya operasional atau penyediaan layanan dapat ditutupi secara adil oleh pengguna layanan atau fasilitas tersebut.

1. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan imbalan langsung berupa penggunaan atau akses terhadap layanan atau fasilitas yang disediakan oleh Pemda. Imbalan ini mencakup hak untuk menggunakan jalan, mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, atau fasilitas umum lainnya sesuai dengan pembayaran yang telah

dilakukan.

2. Iuran memenuhi persyaratan adalah persyaratan formal, dan material. Ini berarti bahwa pembayaran retribusi harus mematuhi ketentuan formal dan materi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan formal mencakup kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku, sementara persyaratan materi meliputi jumlah dan cara pembayaran yang ditetapkan.
3. Retribusi daerah merupakan pungutan yang umumnya biaya tidak menonjol. Hal ini mengindikasikan bahwa besaran retribusi cenderung seimbang dengan manfaat atau layanan yang diterima oleh pihak yang membayar. Dengan kata lain, retribusi diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan secara signifikan bagi pengguna layanan atau fasilitas.
4. Dalam hal-hal tertentu akan tetapi dalam banyak hal, yang tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikemukakan oleh Pemda, yang bertujuan untuk memenuhi permintaan Masyarakat setempat

Ini menunjukkan bahwa retribusi daerah pada dasarnya adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemda untuk menyediakan atau mengelola layanan atau fasilitas yang diminta atau dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan penyediaan layanan publik dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat secara umum.

Retribusi parkir merupakan bagian integral dari Retribusi Daerah karena berfungsi sebagai pembayaran yang dikenakan kepada pengguna jasa parkir untuk layanan penyediaan tempat parkir yang dikelola oleh Pemda. Ini adalah bentuk

kontribusi langsung dari masyarakat atau pengguna layanan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas parkir yang disediakan oleh Pemda setempat. Sedangkan, didalam Peraturan Daerah Kota Batam No. 01 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Pasal 1 Angka 38 disebutkan, Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Perhitungan golongan Retribusi Jasa Parkir berdasarkan, Peraturan Daerah Kota Batam No. 01 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir dijelaskan, Tingkat penggunaan jasa parkir di Tempat Khusus Parkir di ukur berdasarkan jenis kendaraan, dan waktu penggunaan. Besaran tarif parkir pada golongan Jasa Umum, telah di atur dalam lampiran I Peraturan Daerah Kota Batam No. 01 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, sebagai berikut:

a. Mobil Penumpang/Van/Pick Up/Taksi

1. Untuk setiap parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
3. Tarif parkir maksimal sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari atau 24 (dua puluh empat jam tanpa menggunakan layanan VIP/Vallet; dan
4. Tarif layanan VIP/Vallet untuk setiap parkir 1 (satu) jam pertama sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

b. Kendaraan dua dan roda tiga

1. Untuk setiap parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
 2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah); dan
 3. Tarif parkir maksimal sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari atau 24 (dua puluh empat) jam.
- c. Bus/truk (roda 6 (enam)/lebih)
- a. Untuk setiap parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah);
 - b. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah); dan
 - c. Tarif parkir maksimal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atau 24 (dua puluh empat) jam.
- d. Tidak dikenakan tarif parkir apabila masuk dan keluar area layanan parkir (drop off) paling lama 5 (lima) menit.

2.9 Penelitian Terdahulu

| NO | Nama dan Tahun Peneliti | Judul Penelitian | Metode | Hasil Penelitian |
|----|--|--|---------------------|---|
| 1. | (Fauziah Hanum, 2019) Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol.3 No.2 Tahun 2019 | Analisis Pelaksanaan Peraturan Wali Kota No 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri | analisis deskriptif | Hasil penelitian yang menjadi fokus pemeriksaan adalah tahapan-tahapan penyusunan telah dilakukan sesuai aturan pelaksanaan tahapan-tahapan pelaksanaannya. |

| | | | | |
|----|---|---|-----------------------|--|
| 2. | (Deni Kurniawan & Maharani Azzahra) Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) E-ISSN: 2720 – 9393 Vol 5, No 2 (2024) | Analisis Pendekatan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Kasus Di Pelantar II Kota Tanjungpinang Tahun 2023) | Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian dilapangan mengenai implementasi kebijakan pengurangan kantong plastik di Pelantar II sudah berjalan cukup baik. Pendekatan jejaring kerjasama dimana didalam pengawasan kebijakan pihak DLH Kota Tanjungpinang sendiri mengandeng dan berkolaborasi pihak perangkat daerah, pihak akademisi, serta masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini dengan adanya kegiatan gotongroyong membersihkan lingkungan sekitar fasilitas umum setiap minggunya. Dalam hal kerjasama dengan pihak terkait memberikan dampak yang saling menguntungkan terhadap kedua belah pihak. |
| 3. | (Leonardo Wila Tenga, Eri Yusnita Arvianti, Cahyo Sasmito, 2023) JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) Vol 9 No 1 E-ISSN 2460-1586 | Analisis Tata Kelola Kebijakan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Malang | kualitatif | Sementara itu, dari penelitian ini diketahui bahwa retribusi pemberhentian di Kota Malang diawasi oleh Dinas Perhubungan dan Organisasi Pendapatan Daerah dimana pemberhentian retribusi di Kota Malang bergantung pada acuan pedoman provinsi nomor 3 tahun 2015, sehingga faktor penghambatnya adalah mengawasi singgah di Kota Malang adalah petugas pemberhentian/expedit selain fasilitator lapangan. yang tidak dicatat oleh Dinas Perhubungan sehingga menyebabkan keluarnya rencana |

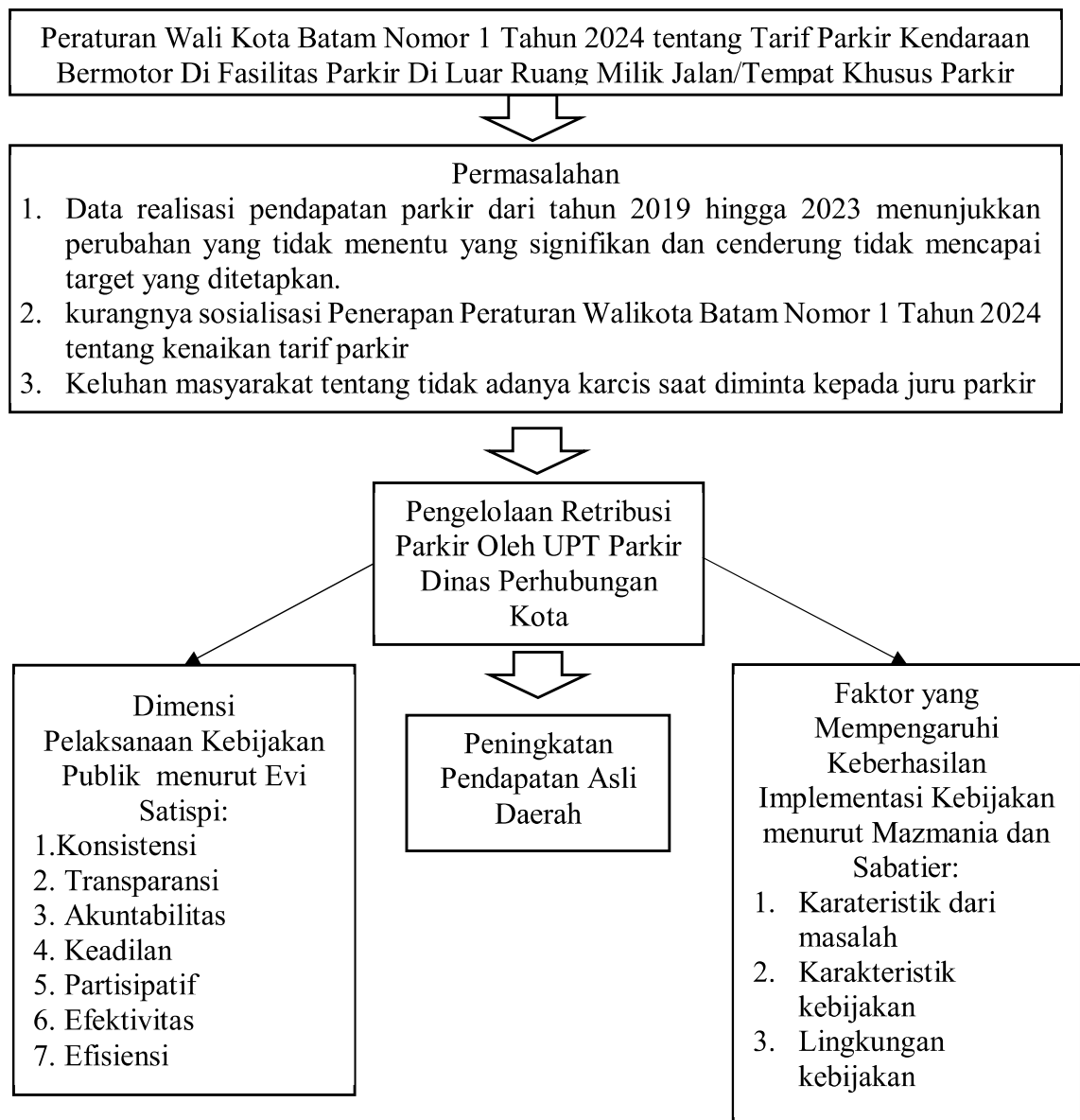
| | | | | |
|----|---|---|------------|--|
| | | | | keuangan, banyaknya pengusaha yang tidak mendaftar dan tidak mendapat informasi dari Bapenda terkait komitmen penyelesaian biaya pemberhentian, dan terakhir, adanya pihak yang mengambil alih area parkir untuk membantu perkumpulan/kumpul-kumpul.. |
| 4. | (Purniati, Henny Aprianty, Rahiman Dani, 2021) Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik Desember 2021 ISSN: 2252-5270 & E-ISSN: 2620-6056 Volume 10 No. 2 | Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bengkulu | Kualitatif | kebijakan retribusi parkir di Pasar Panorama Kota Bengkulu untuk meningkatkan PAD telah terbukti efektif berdasarkan hasil penelitian. Meskipun demikian, masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki oleh Pemda Kota Bengkulu. Meski kebijakan ini telah berhasil meningkatkan pendapatan daerah melalui pengumpulan retribusi parkir di pasar tersebut, perlu dilakukan peningkatan pengawasan lapangan yang lebih ketat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemilik usaha terhadap kewajiban pajak parkir, serta memperkuat koordinasi antarinstansi terkait dalam implementasi kebijakan ini. Dengan demikian, sambil mengakui dampak positif dari kebijakan ini, tetap diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua potensi sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan daerah, |

| | | | | |
|----|---|---|-----------------------|--|
| 5. | Ukas & Zuhti Arman JURNAL SELAT Volume. 8 Nomor. 1, Oktober 2020. p - 2354-8649 I e - 2579-5767 | Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Terhadap Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Batam | Deskriptif kualitatif | Konsekuensi dari eksplorasi masalah ini adalah kurangnya perhatian para visioner bisnis modern dan masyarakat pada umumnya untuk menjaga iklim dari kontaminasi limbah yang tiada henti akan berdampak pada hilangnya sistem biologis alami dan penurunan standar kualitas ekologi. |
| 6. | (Ainun Nur Khalizah Rosal, Sri Nirmalasari, Nurul Afifah, 2020) Jurnal Pabean Vol 2 No 2. Juli 2020 | Analisis Penerapan Peraturan Wali Kota Makassar No 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai sewa Reklame Pada Cv QRA'99 Makassar | deskriptif kualitatif | Hasil pendalaman menunjukkan bahwa penilaian Barang Penilaian Pemberitahuan Layak Usaha (NJOPR) pada CV Iqra' 99 Makassar diselesaikan dengan menjawab kepada Dinas Pendapatan Provinsi Kota Makassar mengenai besaran iklan, jenis iklan dan periode di mana promosi diadakan. Sementara itu, untuk menentukan besaran Essential Benefit Publicizing Pendirian (NSPR), CV Iqra 99 Makassar akan melaporkan Area Pendirian di titik organisasi klien. Pemberlakuan Pedoman Balai Kota Makassar Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Sewa Tempat Komersial diharapkan dapat membantu para pelaku usaha promosi dalam menghitung berapa besaran tarif pemberitahuan dan menjadi bagian penting dalam menegakkan pedoman tarif dalam Kota Makasar. |
| 7. | (Meysi Ansari Br Ginting, Lubna | Analisis Efektivitas | kualitatif | Hasil menunjukkan bahwa Implementasi Perda Kota |

| | | | | |
|----|---|--|------------|--|
| | Salsabila & Etika Khairina) Jurnal PubBis : Vol. 7, No. 2, 2023 | Pelaksanaan Perda Kota Batam No 10 Tahun 2009 Dalam Penyelenggaraan dan Pengembangan Pasar | | Batam No. 10 Tahun 2009 terbukti menguntungkan bagi pengelolaan pasar di Kota Batam, dengan perbaikan desain toko, fasilitas umum, dan infrastruktur pasar. Perda ini juga menyediakan pelatihan bagi pedagang tentang manajemen usaha dan hukum terkait. Namun, ada masalah yang perlu diatasi, seperti pemantauan yang efektif, koordinasi antar otoritas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan konsistensi penerapan peraturan dan meningkatkan efektivitas pembinaan komunitas perdagangan. |
| 8. | (Fidal Aulia Rahmat & Andin Rusmini) Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Volume 01, Number 11, 2023 pp. 110-120E-ISSN: 2988-1986 | Analisis Penerapan Hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Parkiran (Studi Kasus: Kawasan Malioboro Yogyakarta | Kualitatif | Dari analisis ditemukan kurangnya penerapan hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Parkiran. Dalam peraturan tersebut sudah diatur mengenai standar perparkiran untuk Kota Yogyakarta agar tertib dan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan khususnya bagi wisatawan yang berkunjung ke Malioboro |
| 9. | (Riko Riyanda & Timbul Dompok, 2017) Jurnal Niara Vol. 10, No. 1 Juli 2017, Hal. 21-29 | Kebijakan Parkir Kota Batam Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | kualitatif | Hasil yang di peroleh adalah rencana Pemerintah Daerah Batam dalam memperluas Cushion belum terlaksana secara ideal, kendalanya adalah: belum adanya file gambaran pemenuhan yang terbuka untuk mengukur sejauh |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>mana strategi penghentian yang telah dilakukan di Kota Batam, persoalannya SDM yang memerlukan arahan dan persiapan. Pengaturan tersebut mengharapkan perubahan pada Pedoman Provinsi sehubungan dengan penghentian sepenuhnya niat untuk mengubah tingkat penghentian, mengubah kerangka dewan penghentian dan pengembangan lebih lanjut kantor bantuan.</p> |
|--|--|--|--|--|

2.10 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran